

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI KAWASAN DANAU PERINTIS, KABUPATEN BONE BOLANGO

Dwi Indah Yuliani Solihin¹, Umi Rohmatur Rosidah², Adelia Rajak³, Pratiwi Adam⁴,
Faisal Daimun⁵

dwiindah@ung.ac.id¹, umirohmatur@gmail.com², adeliaradjak655@gmail.com³,
admpratiwi849@gmail.com⁴, faisaldaimun6@gmail.com⁵

Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan publik pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata di kawasan Danau Perintis, Kabupaten Bone Bolango. Fokus evaluasi menggunakan kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pemberdayaan masyarakat, masih ada kendala dalam koordinasi antar-pemangku kepentingan, partisipasi masyarakat yang belum optimal, serta alokasi sumber daya yang belum sepenuhnya mendukung. Rekomendasi strategi penguatan kebijakan diberikan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam sektor pariwisata di kawasan Danau Perintis.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata, Evaluasi Kebijakan, Danau Perintis.

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu prioritas strategis dalam pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Sektor ini tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya dan lingkungan. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan berupaya mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat lokal agar mampu berpartisipasi aktif dalam mengelola potensi wisata di wilayahnya.

Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, memiliki beragam potensi wisata alam dan budaya yang belum sepenuhnya dikembangkan secara optimal. Salah satu destinasi yang memiliki prospek besar adalah Kawasan Danau Perintis, yang terletak di Kecamatan Suwawa Timur. Danau ini menjadi salah satu ikon wisata alam yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi penting bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah menerapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya pengembangan kawasan ini menjadi destinasi wisata unggulan daerah.

Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut menghadapi berbagai tantangan. Masyarakat lokal masih banyak yang belum terlibat secara aktif dalam pengelolaan pariwisata, sebagian besar hanya menjadi penerima manfaat secara pasif. Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah dan antar pemangku kepentingan belum berjalan optimal. Evaluasi terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat di kawasan ini diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan sudah efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan publik tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Danau Perintis berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan pemberdayaan masyarakat agar lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk memecahkan masalah publik serta mencapai tujuan tertentu. Menurut Winarno (2012), kebijakan publik mencakup proses mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi. Nugroho (2017) menegaskan bahwa kebijakan publik harus bersifat partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat agar hasilnya efektif. Dalam konteks pembangunan daerah, kebijakan publik menjadi alat penting untuk mengarahkan, mengatur, dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam sektor pariwisata.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat agar mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Sumodiningrat (2018) menyebut pemberdayaan sebagai proses membangun daya masyarakat agar mereka mampu berinisiatif dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sementara Mardikanto dan Soebiato (2019) menjelaskan bahwa pemberdayaan melibatkan upaya enabling, empowering, dan protecting. Dalam konteks pariwisata, pemberdayaan berarti memberi kesempatan bagi masyarakat lokal untuk menjadi pelaku utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata daerahnya.

Pariwisata Berkelanjutan

Konsep pariwisata berkelanjutan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yoeti (2017) menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan harus memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat tanpa mengorbankan generasi mendatang. UNWTO (2020) menambahkan bahwa prinsip utama pariwisata berkelanjutan adalah pelibatan masyarakat lokal, pelestarian lingkungan, serta pemerataan manfaat ekonomi. Dengan demikian, pengembangan pariwisata seperti di Kawasan Danau Perintis perlu memperhatikan aspek keberlanjutan agar kegiatan wisata tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial.

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik berfungsi menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dunn (2018) mengemukakan enam kriteria utama dalam evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Melalui kriteria tersebut, kebijakan dapat diukur kinerjanya baik dari segi hasil maupun dampaknya terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini, evaluasi kebijakan digunakan untuk menilai efektivitas program pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata Danau Perintis.

Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Sektor Pariwisata

Kebijakan pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengelolaan potensi wisata berbasis komunitas. Menurut Sastrayuda (2021), kebijakan semacam ini harus memperhatikan potensi lokal, budaya masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. Kurniawan dan Febriandhika (2023) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan

pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata dipengaruhi oleh dukungan pemerintah, pelatihan keterampilan, dan koordinasi antar-pemangku kepentingan. Dalam konteks Danau Perintis, kebijakan ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Danau Perintis, Kabupaten Bone Bolango. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi dan evaluasi kebijakan dari perspektif para pemangku kepentingan lokal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat pemerintah daerah, pengurus kelompok sadar wisata (Pokdarwis), tokoh masyarakat, dan pelaku usaha pariwisata, serta didukung oleh observasi lapangan dan studi dokumentasi terhadap peraturan, laporan, dan data resmi terkait pariwisata daerah. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menilai kinerja kebijakan, digunakan enam kriteria evaluasi kebijakan publik dari Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, sehingga hasil penelitian mampu menggambarkan secara komprehensif keberhasilan dan kelemahan kebijakan pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata Kawasan Danau Perintis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kawasan Danau Perintis

Danau Perintis merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Terletak di Kecamatan Suwawa Timur, danau ini memiliki luas sekitar 32 hektar dengan pemandangan alam yang indah serta potensi wisata yang besar, baik dari sisi ekowisata maupun wisata buatan. Kawasan ini dikelilingi oleh perbukitan dan vegetasi hijau yang menjadikannya daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah mencanangkan Danau Perintis sebagai kawasan wisata prioritas daerah sejak tahun 2018 dengan harapan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Sebagian besar penduduk di sekitar kawasan ini bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, sehingga pengembangan pariwisata diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru. Namun, kondisi infrastruktur seperti akses jalan, fasilitas umum, serta sarana pendukung wisata masih perlu ditingkatkan agar dapat menarik lebih banyak wisatawan dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

2. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui Dinas Pariwisata telah melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di sekitar Danau Perintis dengan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan pariwisata. Salah satu bentuk implementasinya adalah pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antara masyarakat, pemerintah, dan pengelola wisata. Selain itu, dilakukan pelatihan keterampilan seperti pemandu wisata, pengelolaan kuliner lokal, dan pelatihan pengelolaan homestay. Beberapa program bantuan modal juga diberikan kepada pelaku UMKM yang bergerak di sektor wisata, seperti penyewaan perahu dan penjualan cendera mata. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya

pendampingan pascapelatihan, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah berjalan, efektivitasnya masih perlu diperkuat agar masyarakat dapat benar-benar mandiri dalam mengelola potensi wisata yang ada.

3. Evaluasi Berdasarkan Kriteria Efektivitas

Efektivitas kebijakan pemberdayaan masyarakat diukur dari sejauh mana tujuan utama, yaitu peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, dapat tercapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan di Danau Perintis telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat akan potensi wisata lokal. Beberapa masyarakat mulai berinisiatif membuka usaha di sektor pariwisata seperti warung makan, penyewaan perahu, dan jasa parkir. Namun, dari sisi ekonomi makro, dampaknya masih terbatas karena jumlah wisatawan yang datang belum signifikan. Selain itu, keberlanjutan program pemberdayaan masih lemah akibat minimnya pendampingan dan kurangnya strategi promosi wisata secara digital. Dengan demikian, efektivitas kebijakan masih berada pada kategori sedang dan perlu ditingkatkan melalui penguatan program berkelanjutan serta pelibatan masyarakat yang lebih luas.

4. Evaluasi Berdasarkan Kriteria Efisiensi

Dari aspek efisiensi, pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di Danau Perintis belum sepenuhnya optimal. Penggunaan sumber daya keuangan dan manusia belum sebanding dengan hasil yang diperoleh. Beberapa kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan belum memberikan hasil nyata karena peserta tidak mendapatkan tindak lanjut dalam bentuk program lanjutan atau pendampingan usaha. Selain itu, masih terdapat tumpang tindih program antara Dinas Pariwisata dan dinas lain, sehingga terjadi pemborosan anggaran dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Untuk meningkatkan efisiensi, perlu dilakukan perencanaan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal, serta evaluasi rutin terhadap output dari setiap kegiatan pemberdayaan yang dilakukan.

5. Evaluasi Berdasarkan Kriteria Kecukupan

Kriteria kecukupan digunakan untuk menilai apakah kebijakan yang dilaksanakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pemberdayaan masyarakat di Danau Perintis belum sepenuhnya mencakup seluruh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Program masih banyak menyasar kelompok tertentu, terutama mereka yang sudah tergabung dalam Pokdarwis, sedangkan kelompok lain seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin belum mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini menyebabkan manfaat kebijakan belum dirasakan secara merata. Pemerintah daerah perlu memperluas cakupan program pemberdayaan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar kebijakan yang diterapkan benar-benar mencukupi dan menjawab kebutuhan bersama.

6. Evaluasi Berdasarkan Kriteria Pemerataan

Pemerataan dalam konteks evaluasi kebijakan mengacu pada sejauh mana manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh semua pihak tanpa adanya ketimpangan. Di Kawasan Danau Perintis, manfaat ekonomi dari pengembangan pariwisata masih cenderung dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki akses terhadap modal dan jaringan usaha. Masyarakat berpenghasilan rendah sebagian besar masih berperan sebagai tenaga kerja informal tanpa memperoleh keuntungan signifikan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan belum sepenuhnya menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan afirmatif, seperti bantuan modal bergulir atau pelatihan kewirausahaan khusus bagi kelompok rentan, agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

7. Evaluasi Berdasarkan Kriteria Responsivitas

Responsivitas kebijakan berkaitan dengan sejauh mana kebijakan mampu menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat menilai bahwa kebijakan pemberdayaan yang diterapkan masih bersifat top-down dan belum sepenuhnya memperhatikan aspirasi mereka. Program yang dilaksanakan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan, seperti pelatihan yang tidak relevan dengan potensi lokal atau kurangnya dukungan fasilitas usaha setelah pelatihan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Diperlukan mekanisme partisipatif yang lebih kuat, misalnya melalui forum musyawarah desa wisata, agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan.

8. Evaluasi Berdasarkan Kriteria Ketepatan

Dari segi ketepatan, kebijakan pemberdayaan masyarakat di Danau Perintis sudah mengarah pada sektor yang relevan dengan potensi daerah, yaitu pengembangan pariwisata berbasis alam. Namun, strategi pelaksanaannya belum sepenuhnya tepat sasaran. Misalnya, program pelatihan keterampilan belum disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik masyarakat sekitar. Selain itu, kebijakan masih lebih menekankan pada aspek kegiatan fisik dan administratif, bukan pada penguatan kapasitas sosial ekonomi masyarakat. Agar kebijakan lebih tepat sasaran, perlu adanya pemetaan potensi masyarakat dan sumber daya lokal sebelum pelaksanaan program, sehingga intervensi kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

9. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung keberhasilan kebijakan pemberdayaan masyarakat di Danau Perintis antara lain adalah potensi wisata alam yang tinggi, dukungan pemerintah daerah yang konsisten terhadap sektor pariwisata, serta adanya kelompok masyarakat seperti Pokdarwis yang cukup aktif. Selain itu, meningkatnya minat wisatawan domestik terhadap destinasi berbasis alam menjadi peluang bagi pengembangan wisata ini. Adapun faktor penghambatnya meliputi rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran pemerintah, infrastruktur yang belum memadai, lemahnya promosi digital, serta kurangnya sinergi antar-pemangku kepentingan. Faktor-faktor penghambat tersebut harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam memperkuat efektivitas kebijakan di masa mendatang.

10. Strategi Penguatan Kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa strategi dapat dilakukan untuk memperkuat kebijakan pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata Danau Perintis. Pertama, meningkatkan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi masyarakat agar mereka memiliki keterampilan dan kapasitas dalam mengelola usaha wisata. Kedua, memperkuat peran kelembagaan lokal seperti Pokdarwis dalam pengelolaan destinasi wisata melalui pemberian kewenangan dan dukungan dana operasional. Ketiga, membangun kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, swasta, dan komunitas lokal dalam pengembangan wisata berkelanjutan. Keempat, memperluas promosi pariwisata berbasis digital agar Danau Perintis lebih dikenal luas. Kelima, memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Melalui strategi tersebut, diharapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Kawasan Danau Perintis.

KESIMPULAN

Kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Danau Perintis, Kabupaten Bone Bolango, secara umum telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan ini sudah efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, tetapi masih kurang efisien dan belum merata dalam memberikan manfaat ekonomi. Program pemberdayaan belum mencakup seluruh lapisan masyarakat, dan koordinasi antarinstansi masih lemah. Untuk itu, diperlukan penguatan kebijakan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan berkelanjutan, serta penerapan model pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism) yang melibatkan masyarakat secara aktif agar pengembangan pariwisata di Danau Perintis dapat berjalan lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Sunardi, & Yulian Sri Lestari. (2024). Model Kebijakan Pemberdayaan di Pedesaan Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1).
- Noviana, I., Susilo, K. D., & Haryati, E. (2023). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Budaya di Desa Sendang Soetomo *Administrasi Publik*.
- Ikke Febriandhika, & Teguh Kurniawan. (202?). Pengembangan Pariwisata melalui Pemberdayaan Masyarakat dilihat dari Perspektif Implementasi Kebijakan *Jurnal Pariwisata Pesona*.
- Wulandari, I., & Mustika Kartika Sari, M. (2022). Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Desa Wisata Setigi di Desa Sekapuk *Journal of Civics and Moral Studies*.
- Basir, M., Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2019). Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada Desa Batuma'lonro *JPPM: Journal of Public Policy and Management*.